

## **Sejarah Perkembangan Bioskop Karia Kota Solok (1970-2012)**

**Febriyan Ibnu Rizal<sup>1(\*)</sup>, Erniwati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*febriyanibnu1999@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study examines the development of the Karia Cinema in Solok City during the leadership of the third generation of the Ang family, namely Wirako Angriawan from 1970 to 2012. The Karia Cinema in Solok City is one of the cinemas spread across cities in West Sumatra. The focus of this research will be on how the development of the Karia Cinema in Solok since it was first established until it stopped operating in 2012, including: 1). What is the history of the establishment of the Karia Solok Cinema? 2). How was the development of Karia Cinema in Solok City in 1970-2012? This research includes qualitative research using historical methods, with the following steps: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Sources were obtained through literature and document studies as well as interviews with cinema owners, managers and the people of Solok City. The results showed that the establishment of the Karia Cinema in Solok City was motivated by the great-grandmother of the Karia Cinema owner who came from Solok City. Beginning From the research below, it can be concluded that the Karia Solok Cinema underwent a significant change both in terms of its physical form and function, where the change occurred due to the influence of Modernization. Until in 2012 the Karia Solok Cinema stopped operating.*

**Keywords: Development, Bioscope, Karia, Solok**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan Bioskop Karia Kota Solok pada masa pimpinan generasi ke tiga keluarga Ang yaitu Wirako Angriawan sejak tahun 1970 sampai 2012. Bioskop Karia yang ada di Kota Solok merupakan salah satu bioskop yang tersebar di kota-kota di Sumatera Barat. Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana perkembangan Bioskop Karia di Solok sejak pertama berdiri hingga tidak beroperasi lagi pada tahun 2012, meliputi: 1). Bagaimana sejarah pendirian Bioskop Karia Solok? 2). Bagaimana perkembangan Bioskop Karia Kota Solok pada tahun 1970-2012? Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah, dengan langkah-langkah: Heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan Historiografi. Sumber diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen serta wawancara dengan pemilik bioskop, pengelola dan masyarakat Kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Bioskop Karia di Kota Solok dilatar belakangi oleh nenek buyut pemilik Bioskop Karia yang berasal dari Kota Solok. Awal Dari penelitian di bawah ini dapat disimpulkan bahwa Bioskop Karia Solok ini mengalami perubahan yang signifikan baik itu dari segi bentuk fisik dan fungsinya yang mana perubahan tersebut terjadi karena adanya pengaruh Modernisasi. Hingga pada akhirnya tahun 2012 Bioskop Karia Solok ini berhenti beroperasi.

**Kata Kunci: Perkembangan, Bioskop, Karia, Solok**

## **PENDAHULUAN**

Bioskop hadir di Indonesia seiring dengan diperkenalkannya film pada tahun 1900, bioskop pertama di Indonesia adalah The Roijal Bioscope yang pada penayangannya masa itu berupa potongan gambar perjalanan Ratu dan Raja Hertog Hendrik. Kehadiran The Roijal Bioscope di Batavia telah menginspirasi hadirnya bioskop lain seperti Bioskop Elite, Deca Park, Capitol dan Bioskop Rialto. Perlahan bioskop merambah hampir ke seluruh wilayah Indonesia terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah Kota Bandung dan Surabaya adalah dua tempat di Pulau Jawa yang cepat mendapat pengaruh film dan bioskop. Sedangkan di Pulau Sumatera bioskop juga merambat sampai ke Kota Medan dan Padang (Misbach Yusa Biran, 2009, hlm 54). Pada perkembangan selanjutnya bioskop merambat ke berbagai daerah di Sumatera Barat, seperti di Kota Solok memiliki tiga buah bioskop (Cinema Bioscope, Purnama, Wirayudha). Kota Padang dengan sembilan buah bioskop, Kota Padang Panjang dengan dua buah bioskop, Kota Bukittinggi dengan tiga buah bioskop, Batusangkar dengan dua buah bioskop, Padang Pariaman dengan satu buah bioskop dan Pasaman dengan satu buah bioskop (Vivi Eliyati, 1999, hlm 6). Pengelolaan perusahaan Cinema Bioscope dilakukan secara sistem kekeluargaan. Pada tahun 1950-an Ang Eng Kwan menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada anaknya yang bernama Ang I Siang, pada masa pimpinan Ang I Siang nama Cinema Bioscope diganti menjadi Bioskop Karia (Karia Theater), karena dianjurkan oleh pemerintah agar nama-nama perusahaan dinasionalisasikan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pada masa pengelolaan Wirako Angriawan yang sekaligus menjadi pimpinan dari Bioskop Karia Solok sejak tahun 1970, mendapat saingan dari bioskop-bioskop lainnya di Kota Solok dalam bidang pembaharuan teknologi bioskopnya yang bertujuan untuk menarik minat pengunjung. Di atas bangunan yang memiliki ukuran 20x20x15 inilah Bioskop Karia mampu menjadi pusat hiburan pada tahun 1970-an. Dengan hadirnya Bioskop Karia di Kota Solok tentunya dapat menarik minat masyarakat untuk menonton bioskop dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dari yang awalnya pertunjukan seni hanya dapat disaksikan melalui pertunjukan teater lokal, kini seiring berdirinya Bioskop Karia Kota Solok dengan itu masyarakat bisa menyaksikan film-film lokal maupun mancanegara. Sewaktu masa kejayaan pada Bioskop Karia Kota Solok pada tahun 1980-an mematok harga tiket senilai Rp.1.500,- dan mampu menghabiskan 500 tiket dalam satu harinya dengan menayangkan berbagai film yang dibintangi oleh actor yang terkenal pada saat itu seperti, Rhoma Irama (Indonesia), Amitabh Bachchan (India), Jackie Chan (Cina). Dalam penayangan filmnya Bioskop Karia menayangkan dua film perharinya pada hari biasa (Senin-Jum'at) dan tiga film perharinya pada akhir pekan (Sabtu-Minggu). Dikarenakan keterbatasan pita film Bioskop Karia, penayangan film nya dilakukan secara bergiliran pada Bioskop Karia yang didirikan di beberapa kota dalam Sumatera Barat. Masing-masing dari Bioskop Karia memiliki perbedaan dalam hal daya tarik penonton film seperti, Bioskop Karia Solok (film Rhoma Irama), Bioskop Karia Padang (film Mandarin).

Penelitian mengenai “Sejarah Perkembangan Bioskop Karia Kota Solok Dari Tahun 1970-2012” sejauh ini belum ada yang membahas, penelitian lain yang membahas sejarah perkembangan bioskop lainnya di Sumatera Barat, adalah penelitian yang dilakukan oleh Vivi Eliyati yang berjudul “Sejarah Bioskop di Kota Padang: Studi Kasus Bioskop Karia Padang tahun 1921-1995” yang membahas tentang latar belakang pendirian, proses perkembangan sarana fisik maupun sarana pendukung dan juga menjelaskan tentang keadaan dari penonton Bioskop Karia Padang. Adapun hal yang bisa didapatkan dari kajian ini untuk penelitian penulis adalah tentang bagaimana perkembangan minat pengunjung dari tahun 1970 hingga 1995 dan juga alur pemutaran film nasional di Bioskop wilayah Sumatera Barat. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Sri Alvionita yang berjudul “Sejarah Bioskop Purnama Padang tahun 1956-1990”, yang membahas tentang latar belakang pendirian bioskop, hasil dari penelitian ini berisikan jatuh bangunnya Bioskop Purnama dalam perkembangan sarana pendukung dan minat pengunjung Bioskop Purnama Padang. Adapun manfaat dari skripsi ini dapat mengetahui struktur penulisan sejarah perkembangan suatu bioskop dan menjadi data pembanding antara Bioskop Karia Solok dengan Bioskop Purnama Padang. Ketiga, sebuah buku yang ditulis oleh Haris Jauhari yang berjudul “Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia”, Buku ini berisikan uraian tentang pertumbuhan bioskop dari awal kemunculannya di Indonesia hingga sampai tahun 1991. Uraian dilakukan secara umum, yaitu tanpa memberikan penjelasan secara terperinci tiap daerah di Indonesia. Aspek yang diperhatikannya adalah bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan film dan sarana pendukung bioskop lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni: langkah yang pertama adalah heuristik, yaitu merupakan tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah dilakukan dengan dua cara yaitu, studi perpustakaan dan studi lapangan. Studi perpustakaan dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mendapatkan data perizinan dari berdirinya Bioskop Karia, data nama-nama bioskop se-Provinsi Sumatera Barat. Dilakukan juga pencarian arsip dan data-data mengenai jumlah penonton dan film yang ditayangkan pada Bioskop Karia dan bioskop lainnya pada tahun 1970-2012 di Sumatera Barat yang bisa didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. mencari sumber-sumber primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dilakukan dengan wawancara dengan Wirako Angriawan sebagai pemilik dari PT. MHI yang mendirikan Bioskop Karia dan salah satu karyawan di Bioskop Karia Kota Solok yang bernama Feri. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan, yang didapatkan dari perpustakaan di Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Negeri Padang (UNP).

Langkah kedua adalah kritik sumber atau tahap pengolahan data, atau menganalisis sumber informasi, melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal yaitu pengujian otentitas atau keaslian materialnya yang dapat dilakukan dengan melihat kualitas kertas, tinta, bentuk huruf, bahasa secara klinis dan labor. Dalam wawancara penulis

melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara apakah informasi yang mereka berikan benar atau tidak. Pengecekan ini dilakukan dengan cara membandingkan jawaban dari semua informasi. Langkah ketiga adalah interpretasi dimana penulis menggabungkan data dan sumber yang telah diperoleh sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sebelum dan selanjutnya ke tahap penulisan. Penulis memilah-milah atau membedah sumber sehingga ditemukan butir-butir informasi yang sebenarnya atau sudah diuji lewat kritik sumber. Langkah keempat adalah tahap penulisan sejarah (historiografi), merupakan langkah terakhir di mana penulis melakukan penulisan dari data fakta dan sumber yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah. Dalam penulisan sangat diperlukan ketelitian dan wawasan serta ide yang sangat baik (Louis Gottschalk, 1985, hlm 43).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Berdirinya dan Perjalanan Bioskop Karia**

#### **a. Sebelum Kemerdekaan Indonesia (1921-1945)**

Cinema Bioscope (Bioskop Karia sekarang) didirikan pada tahun 1921, atas prakarsa Perseroan Terbatas Maskapay Handle Industri (PT.MHI) berkedudukan di Kota Padang yaitu di Jalan Batang Arau, No. 84, didirikan oleh We Shu Kiat. Pada asal mulanya PT. MHI bergerak di bidang kilang minyak manis dan ekspor serta impor hasil-hasil perkebunan seperti kopi, kulit manis, getah dan lain-lain. Hasil-hasil perkebunan ini didapati langsung dari daerah pedalaman Minangkabau seperti; Solok, Batusangkar, Sungai Penuh dan daerah penghasil perkebunan lainnya yang berada di kawasan Minangkabau. PT. MHI yang berkedudukan di Kota Padang tepatnya di Jalan Batang Arau No. 84, didirikan oleh We Shu Kiat, karena usahanya dalam bidang ini mengalami penurunan akibat persaingan dengan perusahaan lain maka dengan itu atas prakarsa menantunya yang bernama Ang Eng Kwan, membuka usaha baru dalam bidang jasa yang memberikan hiburan kepada masyarakat melalui film yang di tayangkan dalam bioskop (Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021). Dengan didirikannya Cinema Bioscope, PT. MHI mengalami perkembangan dalam bidang ekonominya, disamping masih mengusahakan kilang minyak manis dan ekspor-impor hasil-hasil perkebunan. Kemudian pimpinan PT. MHI dialihkan kepada Ang Eng Kwan, khususnya dalam mengelola usaha bioskop tersebut. Pada mulanya Cinema Bioscope memiliki sebuah tempat pertunjukan yang besar, yang dibagi atas beberapa kelas.

Kelas satu tempat duduknya paling belakang, kelas dua tempat duduknya di tengah-tengah dan kelas tiga terletak di bagian paling depan. Masing-masing kelas memiliki pintu masuk yang berbeda. Pertunjukan film di Cinema Bioscope pada mulanya menyajikan film-film bisu, masyarakat yang menyaksikan pertunjukan film ini harus membayar terlebih dahulu. Dengan begitu masyarakat yang menyaksikan dan menikmatinya adalah golongan tertentu saja yaitu mereka yang mempunyai pendapatan lebih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seiring dengan perkembangan Cinema Bioscope pada masa awal berdirinya ini, pertunjukan filmnya menayangkan film-film bisu yang diiringi dengan musik atau suara orang di belakang layar pada waktu film

sedang diputar. Pada mulanya Pemerintah Belanda kurang menaruh perhatian terhadap kemunculan bioskop dan kedatangan film di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial membiarkan munculnya bioskop di Hindia Belanda, karena dengan kemunculan bioskop ini menambah fasilitas hiburan bagi masyarakat, khususnya orang-orang Eropa. Setelah terjadinya perkembangan bioskop di daerah Hindia Belanda termasuk Kota Padang, Pemerintah Kolonial mulai memberikan dukungan terhadap bidang ini. Dengan melihat besarnya perkembangan Cinema Bioscope maka pimpinannya Ang Eng Kwan yang sekaligus pimpinan dari perusahaan MHI mendirikan bioskop baru di Kota Padang yaitu Apollo Bioscope (Bioskop Satria) pada tahun 1926 dan Rio Bioscope (Bioskop Mulia) pada tahun 1936. Sedangkan usaha dalam bidang kilang minyak manis dan ekspor-impor rempah-rempah tidak memberikan hasil yang memuaskan lagi, sehingga pimpinan perusahaan menutup usahanya dan tidak dioperasikan lagi, dengan begitu perusahaan MHI hanya bergerak dalam bidang hiburan yaitu usaha bioskop dan distributor film (Martina Lizuardi, 1995, hlm 63).

Memasuki tahun 1942 tepatnya pada tanggal 17 Maret, bala tentara Jepang telah memasuki Padang dan Bukittinggi tanpa mendapat perlawanan dari pihak Belanda. Pertama kali menjejakkan kakinya di Sumatera Barat. Jepang memperlihatkan rasa empati dan rasa bersaudara terhadap rakyat. Setelah Jepang mulai dapat mempelajari situasi dan kondisi di Sumatera Barat dan sesudah roda pemerintahan agak berjalan kira-kira tiga bulan, mulailah Jepang melakukan kekerasan dalam menjalankan kekuasaannya di Sumatera Barat. Kebebasan dan sikap bersaudara yang mulai hidup di tengah masyarakat mulai dikurangi dan ditekan. Dalam rangka menguasai daerah Indonesia, Jepang berusaha mengendalikan media komunikasi massa seperti, surat kabar, film bioskop, majalah, kantor berita, panggung sandiwara, radio dan sebagainya. Media komunikasi itu digunakan Pemerintah Jepang untuk menyampaikan propagandanya. Melalui bidang kesenian (film dan panggung sandiwara) diperlihatkan kehebatan Jepang, untuk keperluan itulah Pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang diberi nama dalam bahasa Jepang yaitu "*Keimin Bunka Shidosho*" (Depdikbud, 1977, hlm 177).

Pemerintah Jepang membuat konsep baru dalam dunia perfilman. Konsep yang meletakkan film sebagai sarana propaganda politik untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia. Keadaan ini membawa dampak terhadap pemilik bioskop, perusahaan film dan jenis produksi film yang akan ditayangkan atau diedarkan, begitu juga keadaannya di Cinema Bioscope (Heru Erwantoro, 1995, hlm 43). Pada masa pendudukan Jepang, ekonomi masyarakat Sumatera Barat termasuk Padang mengalami masa-masa yang sulit. Dengan merosotnya nilai uang Jepang maka kebutuhan sehari-hari sulit diperoleh dan harganya yang melambung tinggi sehingga menyebabkan perdagangan menjadi lumpuh. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan masyarakat Kota Padang mengakibatkan merosotnya jumlah pengunjung di bioskop, ditambah dengan diberhentikannya impor film asing membuat pengusaha bioskop sulit mendapatkan film-film yang akan ditayangkan pada bioskopnya (MD Mansoer, 1970, hlm 209-210). Cinema Bioscope pada masa ini hanya menayangkan film-film yang sudah ada pada distributor film daerah Sumatera Barat

(PT. MHI), yaitu stok lama yang diberi izin putar oleh Pemerintah Jepang dan film-film dari negara Jepang sendiri. Film-film stok lama yang diizinkan oleh Pemerintah Jepang untuk diputar adalah film-film produksi Indonesia yang jumlahnya tidak mencukupi.

#### **b. Setelah Kemerdekaan Indonesia (1945-1990)**

Pada masa awal kemerdekaan, dunia film dan perbioskopian Indonesia termasuk Padang relatif mengalami kelumpuhan. Keadaan ini tidak terlepas dari pemerintah pendudukan Jepang yang melarang impor film, sehingga film yang akan diputar sulit didapat. Pada akhir tahun 1945 bioskop di kota-kota besar termasuk Padang mulai kembali berkembang, disebabkan impor film asing dibolehkan oleh penguasa Sekutu dan Belanda dikemudian. Prajurit-prajurit NICA di kota-kota itu membutuhkan bioskop sebagai hiburan penghilang lelah. Memasuki awal dekade 1950-an, muncul kembali gedung-gedung bioskop. Keadaan ini disebabkan oleh dua faktor utama, Pertama, munculnya perusahaan film yang dibuat oleh Pribumi Indonesia yang berjumlah 13 perusahaan film, diantaranya Umar Ismail dan Jamaludin Malik (Salim Said, 1982, hlm 39). Kedua, persatuan pengedar film dan impor film mulai ditangani secara serius bersamaan dengan jumlah film yang masuk semakin banyak, organisasi importirpun berdiri dengan nama Gabungan Importir Film Indonesia (GIFI) (Putu Setia, 1995, hlm 52-53). *Cinema Bioscope* pada tahun 1950-an telah menayangkan film-film yang bicara. Masa ini pimpinan perusahaan MHI yang sekaligus pimpinan *Cinema Bioscope* digantikan oleh anak Ang Eng Kwan yaitu Ang I Siang, karena Ang Eng Kwan meninggal dunia dalam usia 56 tahun. Pada Masa Orde Lama banyak terjadi pergejolakan politik di Indonesia. Dengan begitu, keberadaan dunia perfilman dan bioskop ikut berpengaruh.

*Cinema Bioscope* pada masa terjadinya pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) mengalami masa-masa yang sulit. Pada masa ini pertunjukan film satu kali sehari yaitu pada jam 7 malam. (Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021) Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam perkembangan *Cinema Bioscope* masa itu, yaitu faktor keterlamabatan masuknya film dari pusat ke daerah, sehingga pertukaran film di *Cinema Bioscope* mengalami hambatan. Selain itu, biaya untuk mendatangkan film dari pusat ke daerah terlalu mahal dibandingkan dengan pendapatan bioskop sendiri. Apalagi terdapat pula faktor politik memasuki tahun 1960-an, sebagian besar warga Kota Padang terpaksa mengungsi ke luar kota karena adanya Operasi Pemilihan Keamanan Angkatan perang Republik Indonesia (APRI) yang berlangsung di Kota Padang, akibat adanya pembentukan pemerintah tandingan dengan nama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), gejala demikian menyebabkan *Cinema Bioscope* menjadi sepi dari para pengunjung (Mochtar Naim, 1979, hlm 262-266). Pada tahun 1964, PKI dan simpatisannya melakukan penggayangan di beberapa daerah di Sumatera Barat terhadap berbagai produk seni hiburan yang dianggap berbau asing. Pada dunia bioskop dan film khususnya, terjadi pelarangan pemutaran film-film India dan Amerika. Akibatnya terjadi kekacauan pada peredaran film, film-film dari negeri sendiri yang jumlahnya tidak seberapa dipergunakan sebagai pengganti film-film Amerika dan ditambah film dari negara sosialis, yang juga tidak bisa mencukupi kebutuhan bioskop dan

penontonnya (Budiarto Danujaya, 1992, hlm 68-84). Pada tahun 1965, hanya 15 judul film nasional yang dibuat sehingga terjadinya perebutan dalam sewa film oleh pemilik bioskop, baik di pusat (Jakarta) maupun di daerah.

Film-film nasional yang dibuat pada tahun 1965 adalah Rimba Bergema, Liburan Seniman, Insan Bahari (produksi Perfini), Karma, Darah Nelayan, Tjinta Di Ujung Tahun (Anggoro Film). Apa Jang Kau Tangisi, Matjan Kemajoran (Aries Nusantara Garuda Film), Buruh Pelabuhan (Gema Masa Film), Sahabat-Sahabat Dalam Gelap (Ifdil), Takkan Lari Gunung Dikejar (Ifdil Tjendrawasih Film), Terpikat (Kejora Film), Langkah-Langkah Di Persimpangan (Nefas Film) dan Luka Tiga Kali (Matt Bento, 1992, hlm 88). Pada masa pimpinan Ang I Siang tahun 1968, terjadi penukaran nama Cinema Bioscope menjadi Bioskop Karia atau Karia Theater. Penukaran nama ini tidak saja terjadi pada Bioskop Karia, tapi juga pada semua usaha yang ada di Indonesia yang menggunakan nama dengan bahasa asing, terutama pada nama-nama bioskop yang memang banyak menggunakan bahasa asing. Penukaran nama ini atas anjuran dari pemerintah Indonesia supaya setiap nama-nama usaha yang menggunakan bahasa asing diganti dengan nama yang menggunakan Bahasa Indonesia. Ketentuan ini dilakukan pemerintah setelah terjadinya peristiwa Gestapu atau Gerakan 30 September 1965 (Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021).

## 2. Sarana Pendukung

Salah satu usaha yang dilakukan pengusaha bioskop untuk memuaskan penontonnya adalah melalui kegiatan pelayanan. Bioskop Karia dalam melakukan pelayanan berpedoman pada kebutuhan penonton dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau melayani penontonnya. Pada awal kepemimpinan Wirako Angriawan, gedung Bioskop Karia tetap seperti sebelumnya yaitu dalam satu ruangan besar yang menayangkan sebuah film dalam satu kali tayang. Ruangan tersebut dibagi atas dua kelas, masing-masing terdiri dari kelas I dan kelas II. Kelas I kursinya terletak di bagian belakang dan kelas II terletak di bagian depan layar film. Masing-masing kelas ini mempunyai pintu masuknya sendiri, berdasarkan harga tanda masuk (HTM) yang dibeli penonton. Harga Tanda Masuk masing-masing kelas ini berbeda, sesuai dengan HTM kelas I lebih mahal dibandingkan kelas II, sarana yang tersedia di Bioskop Karia Solok sebagai berikut:

**Tabel 1. Sarana pendukung Bioskop Karia Kota Solok**

<b>Sarana Pendukung</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Proyektor	1	Tidak ada perubahan
Layar Proyektor	1	Tidak ada perubahan
Kursi Penonton	300	Pada tahun 1970-an hanya 150 buah kursi, lalu pada tahun 1980-an ditambah menjadi 300 buah kursi
Toilet	2	Pada tahun 1980-an menjadi 4 buah toilet
Pintu Masuk	2	Tidak ada perubahan

Lahan Parkir	1	Tidak ada perubahan
Kasir	1	Tidak ada perubahan
Cafetaria	1	Tidak ada perubahan
Air Condition (AC)	4	Tahun 1980-an ditambah menjadi 6 unit

Sumber: Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021

Dengan bertambahnya tahun dan teknologi, pelayanan terhadap penonton makin meningkat. Masuk dan berkembangnya sineplek di Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an membuat usaha perbioskopian makin semarak. Sineplek yaitu dalam satu buah gedung bioskop mempunyai beberapa buah studio, masing-masing studio tersebut menayangkan film yang berbeda, dengan begitu pengunjung dapat memilih film yang menurutnya menarik untuk dinikmati dan ditonton.

### **Gambar 1. Suasana Dalam Gedung Bioskop Karia Solok**



Sumber: Arsip Komunitas Gubuk Kopi Padang Panjang  
(Foto diambil pada April 2012)

Fasilitas lain yang dilakukan Bioskop Karia Solok 1970-an sudah menggunakan AC (Air Condition) guna menjaga suhu ruangan demi kenyamanan pengunjung yang akan menikmati film yang sudah tersedia, tempat duduk yang disediakan dalam bioskop memakai gabus membuat bangku atau kursi ini nyaman untuk diduduki oleh pengunjung. Di samping kebutuhan di atas, penonton juga menghendaki ketenangan dalam menikmati pemutaran film, ketenangan penonton ini dapat berupa jaminan keamanan bagi kendaraan milik penonton dan suasana lingkungan bioskop dijaga oleh beberapa TNI AD dan Kepolisian. Dalam menghadapi saingan dengan bioskop-bioskop yang berada di Kota Solok seperti Bioskop Purnama dan Bioskop Wirayudha, pimpinan berusaha melakukan promosi kepada calon penonton melalui:

- a. Pemasangan iklan pada media surat kabar yang terbit di Kota Solok diantaranya Harian Haluan, Harian Singgalang



- b. Penyiaran film-film yang akan dipertunjukkan pada radio swasta yang berada di Kota Solok
  - c. Pemasangan poster-poster film di depan gedung Bioskop Karia
  - d. Pemasangan gambar-gambar film yang akan dipertunjukkan pada papan-papan promosi yang disediakan di ruang tunggu Bioskop Karia
  - e. Pemutaran sebagian dari rangkaian cerita dari film yang akan dipertontonkan.
- Sumber: Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021.

### **Gambar 2. Spanduk Promosi Film Bioskop Karia Solok**



Sumber: Arsip Komunitas Gubuk Kopi Padang Panjang  
(Foto diambil pada April 2012)

### **3. Tayangan Film**

Dalam rangka pemutaran film bagi pertunjukan di bioskop maka diperlukan beberapa pertimbangan sehubungan dengan keterbatasan persediaan film, baik mengenai kualitas maupun kuantitas terhadap kebutuhan yang cocok dengan selera penonton. Jenis-jenis film yang diedarkan selama ini di Kota Solok khususnya dan Sumatera Barat umumnya adalah jenis film yang berasal dari negara Amerika, Eropa, Jepang, Hongkong, India, Taiwan, Indonesia dan sebagainya. Jenis film ini biasanya dikelompokkan ke dalam film Barat yaitu film Amerika dan Eropa. Film Asia non mandarin yaitu film Jepang, Taiwan dan lain-lain, film Mandarin yaitu film Hongkong dan film nasional yaitu film Indonesia (Vivi Eliyati, 1999). Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka pimpinan Bioskop Karia dalam mendapatkan film melakukan penyewaan maupun kontrak film pada berbagai pemilik film, yang secara garis besarnya dibagi atas dua golongan besar yaitu film nasional dan film impor. Film nasional diedarkan oleh PT. Perfin (Perusahaan Pengedar Film Nasional) tingkat pusatnya berada di Jakarta dan PT Perfin cabang yang berada di daerah-daerah. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Penerangan No. 49/Kep/Menpen/1975, Menteri Dalam Negeri No. 88A tahun 1975 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096 a/u/1975 (Dewan Film Nasional, 1980, hlm 52). Di tingkat

daerah PT. Perfin cabang dibantu oleh sub ordinatnya adalah PT. MHI (Maskapay Handle Industri) dan PT. Virgo Film.

Dalam rangka peningkatan produksi film nasional, maka pemerintah melalui Departemen Penerangan Republik Indonesia membatasi jumlah film asing yang masuk ke Indonesia dengan memperketat penyeleksian film-film impor. Pemerintah hanya mengizinkan perusahaan importir film mengimpor film jika telah memproduksi film nasional sebanyak yang sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu sebanyak tiga buah film nasional. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mendorong peningkatan produksi film nasional, yang mulai kelihatan pada tahun 1977. Catatan Direktorat Film Departemen Penerangan menunjukkan bahwa pada tahun 1977, surat izin produksi yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Penerangan lebih dari 100 buah.

**Tabel 2. Perimbangan Film Nasional Dan Film Impor Dalam Berdasarkan Judul**

<b>Tahun</b>	<b>Film Nasional</b>	<b>Film Impor</b>
1976	57	350
1977	134	300
1978	73	270
1979	50	260
1980	73	260
1981	71	240
1982	48	200
1983	76	180
1984	77	180
1985	63	180
1986	91	180
1987	70	170
1988	82	170
1989	90	170
1990	60	100
1995	6	4

Sumber: Rita Sri Hastuti, "Monopoli, Ada, Tidak Ada..." Editor No. 49 Tahun II pada tanggal 12 Agustus 1989, hal. 21 dan Procoyo Wiryoutomo, "Bioskop Kelas Bawah Lagi Sekarat", Forum No. 8 pada tanggal 31 Juli 1995, hal. 7

Tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan jumlah judul film impor yang masuk ke Indonesia. Sebaliknya pada jumlah judul film nasional yang diproduksi dalam negeri mengalami peningkatan hingga tahun 1989. Sejak tahun 1990-an jumlah produksi film nasional menurun secara drastis, dengan dilema yang dihadapi semakin kurangnya frekuensi edaran film nasional di bioskop-bioskop dan makin kurangnya tema yang disuguhkan oleh film nasional bila dibandingkan dengan film impor. Bagi film nasional setelah lepas dari Badan Sensor Film, film tersebut wajib untuk mendaftarkan judul filmnya ke PT. Perfin (Pengedar Film Nasional) untuk masuk dalam jadwal peredaran yang ditata setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap pemilik bioskop dapat mengetahui dan memilih judul-judul film tiga bulan mendatang untuk ditayangkan pada gedung bioskopnya serta

jadwal penayangannya. Sensor film yang dilakukan pemerintah secara berlebihan untuk kepentingan stabilitas sosial-politik membuat semakin sempitnya tema film nasional. Untuk memproduksi sebuah film yang memunculkan realita kehidupan sehari-hari sulit untuk dibuat, dan untuk mendapatkan izin produksi sebuah skenario baru akan diluluskan jika telah mendapat izin dari Departemen Penerangan. Setelah film selesai diproduksi, film tersebut harus mengalami sensor akhir oleh pihak BSF (Badan Sensor Film) (Tim Media, 1991).

Memasuki awal tahun 1990-an, jalur pemutaran film nasional tersebut tidak berlaku lagi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya bioskop tersebut ada yang tidak beroperasi lagi dan munculnya bioskop-bioskop modern. Dengan begitu, penayangan film nasional selanjutnya hanya berdasarkan pengusaha bioskop bersangkutan yang menyewa kepada PT. Perfin Cabang Sumatera Barat melalui sub ordinatnya (Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021). Sementara itu, film impor yang didatangkan ke Indonesia diedarkan oleh Kantor Peredaran Film Impor yang dibentuk oleh tiga asosiasi importir film (Amerika dan Eropa, Asia dan Mandarin serta Mandarin) yang berpusat di Jakarta dan dilanjutkan di daerah-daerah. Kantor peredaran film impor di daerah dibantu oleh Darfida. Darfida ini berkewajiban membayar film yang diberikan kepada mereka berdasarkan sewa persentase kekuatan pasar wilayah edarnya (Vivi Eliyati, 1999). Peredaran dan pemutaran film impor di bioskop ditetapkan berdasarkan tingkatan bioskop. Pemutaran pertama dimulai dari Kota DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dan kota pertama, setelah itu film tersebut diserahkan kepada Darfida inti meliputi Surabaya – Bandung – Palembang – Semarang – Medan – Ujung Pandang sebagai kota utama, ibukota provinsi dan kabupaten tertentu sebagai kota menengah termasuk Kota-kota di Sumatera Barat. Menurut Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 43 tahun 1971 tentang “Perusahaan Distributor Film Daerah” yang berisikan tentang perusahaan yang berdomisili di daerah-daerah di luar Kota DKI Jakarta, yang merupakan perwakilan dari sebuah atau lebih importir film di Jakarta dengan memiliki bukti surat pengangkatan sah dari importir film yang bersangkutan (Dewan Film Nasional, 1971).

Setelah Bioskop Kencana, Purnama dan Taman Hiburan Rakyat Dodix Simpang Haru tidak beroperasi lagi, maka masing-masing distributor yang mengelola bioskop tersebut juga tidak beroperasi lagi. Dengan begitu, Darfida yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat ada dua yaitu PT. MHI yang mengelola kelompok film Asia non Mandarin dan PT. Raya yang mengelola kelompok film Barat dan kelompok film Mandarin. Bioskop Karia Solok dalam mendapatkan film melakukan penyewaan film pada PT. Perfin cabang melalui sub ordinatnya untuk film nasional dan Darfida untuk film impor. Bioskop Karia menayangkan film yang baik dalam arti kualitas maupun kuantitas filmnya. Bagi Bioskop Karia Solok yang memutar film Barat dan Mandarin, haruslah melakukan hubungan baik dengan PT. Raya sebagai penyalur film Barat dan Mandarin. Dalam hal ini Bioskop Karia Solok dalam memutar satu judul film Barat yang baru datang, ada keterlambatan memutar satu atau dua hari dari Bioskop Raya (Kepemilikan distributor PT. Raya). Untuk membantu

usaha perbioskopian, pemerintah membuat Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 42 tahun 1971, yang mengatur sistem pembayaran film sebagai berikut:

- a. Sepertiga dari harga tanda masuk (HTM) untuk pajak tontonan yang dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Duapertiga dari harga tanda masuk (HTM) untuk jasa film dan bioskop.

Sebelum dilaksanakannya sistem pembayaran bagi hasil itu, maka sistem pembayaran film berdasarkan sewa atau kontrak langsung. Dalam sistem sewa atau kontrak langsung, penyewa mempunyai hak untuk menguasai film tersebut menurut jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, bukan memiliki film untuk selamanya. Sebelum penyerahan film oleh pemilik film terlebih dahulu dibuat perjanjian tertulis yang isinya antara lain sebagai berikut:

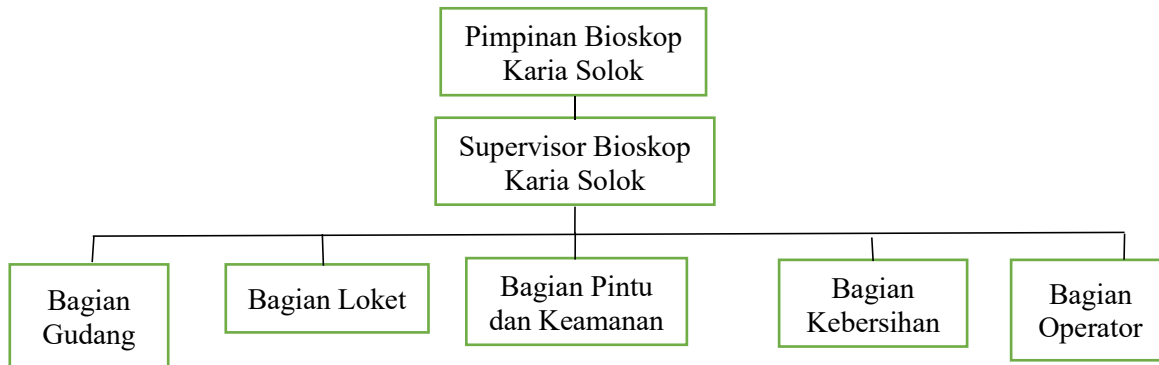
- a. Judul film yang disewa
- b. Mengenai pembayarannya
- c. Lamanya waktu penyewaan
- d. Besarnya keterlambatan dan kerusakan film
- e. Daerah peredaran film
- f. Dan hal-hal yang dirasa perlu

Dalam penyewaan lansung ini, setelah memenuhi kebutuhan bioskopnya terhadap film, maka PT. MHI sebagai distributor film dapat menyewakan film tersebut kepada bioskop-bioskop lainnya yang berada di kawasan edarnya. Uang sewa dari bioskop lain tersebut masuk ke dalam kas PT. MHI. Berbeda dengan sistem sewa persentase bagi hasil, perjanjian atau kerjasama bagi hasil antara pemilik film dengan pemilik bioskop mengacu kepada ketentuan Menteri Penerangan No. 42 tahun 1971. Biasanya 60% setelah dikurangi pajak untuk pemerintah daerah yaitu pajak tontonan dan pajak penjualan untuk pemilik film, diperoleh pengusaha bioskop. Adakalanya hasil ini dibagi sama antara pemilik film dengan pengusaha bioskop (masing-masing 50%). Besarnya pembagian hasil ini tergantung pada keadaan film dan hubungan baik antara pemilik bioskop dan pemilik film tersebut. Ketentuan ini memberikan kemudahan kepada pengusaha bioskop karena pengusaha tidak perlu menyediakan modal yang besar untuk mendapatkan film. Sewa film tersebut dapat dibayar setelah pertunjukan atau penayangan film dilakukan dengan berdasarkan jumlah penonton (Wawancara dengan Feri, 28 September 2021). Ketentuan pemutaran film yang dilakukan dalam sistem sewa bagi hasil, yaitu perusahaan distributor film di daerah Sumatera Barat menyewa film ke pusat (Jakarta), baik itu film impor atau film nasional dalam jangka waktu tertentu. Darfida lalu menyewakan film tersebut pada bioskop terkemuka atau yang sudah berkelas A terlebih dahulu, setelah pemutaran film itu di bioskop kelas A maka film tersebut dipulangkan dahulu kepada Darfida dan dilanjutkan ke pusat menurut jangka waktunya. Setelah film tersebut ditayangkan pada bioskop-bioskop terkemuka di wilayah edar inti seluruh Indonesia, maka kantor peredaran film pusat memberikan film tadi kepada bioskop-bioskop kelas B dan seterusnya melalui Darfida masing-masing daerah.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam suatu usaha, karena melalui ini setiap anggota organisasi dapat mengetahui sampai sejauh mana wewenang yang dimilikinya dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Tanggung jawab dan pelimpahan wewenang itu diberikan batasan yang jelas sehingga dapat dihindari suatu kerja rangkap dan saling bertentangan sejauh mungkin. Terbentuknya kerjasama dari beberapa individu tersebut dan mengetahui tanggung jawabnya mendorong mereka untuk lebih giat bekerja dalam mencapai satu tujuan yang sama. Struktur organisasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya, tergantung pada sifat bidang usaha, tujuan serta besar kecilnya perusahaan. Dalam struktur organisasi Bioskop Karia Solok, yang merupakan salah satu unit usaha PT. MHI yang terdiri dari unsur pimpinan, lalu supervisor dan bagian-bagian operasional, secara lengkap dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 1. Struktur Organisasi Bioskop Karia Solok**



Sumber: Wawancara dengan Wirako Angriawan, Direktur PT. MHI Padang

Berhubung Bioskop Karia Solok merupakan salah satu unit usaha dari PT. MHI, maka Wirako Angriawan selain menjadi direktur PT. MHI (Maskapay Handle Industri) Padang, juga menjadi pimpinan Bioskop Karia Solok. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pimpinan Bioskop Karia Solok bekerja sama dengan supervisor bioskop yang terdiri dari dua orang. Tugas supervisor ini adalah mengawasi dan mengatur bawahannya dalam menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya usaha, supervisor mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pimpinan atau pengelola bioskop. Di bawah supervisor Bioskop Karia Solok terdapat lima bagian yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda. Bagian gudang yang terdiri dari satu orang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan film untuk diputar di Bioskop Karia Solok. Mereka menangani masalah penerimaan dan pengiriman film dari Darfida dan sub ordinat PT. Perfin cabang Sumatera Barat, memelihara atau menjaga keamanan persediaan film dan peralatan lainnya, serta menangani masalah iklan dan promosi yaitu melaksanakan strategi publikasi setiap film yang akan diputar di Bioskop Karia Solok. Bagian loket bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang administrasi keuangan Bioskop Karia Solok, dalam bidang ini ada dua orang karyawan yang bertugas

untuk penjualan karcis. Setelah itu membuat laporan atau pembukuan keuangan meliputi berapa banyak karcis yang terjual dan berapa karcis yang belum terjual serta seberapa banyak pendapatan pada pertunjukan tersebut. Bagian keamanan bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dari kelancaran pertunjukan. Di antara tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga pintu masuk bioskop pada waktu penonton hendak masuk ke dalam bioskop dengan cara memeriksa karcis para penonton, pada bagian ini terdiri dari dua orang karyawan. Serta dibantu oleh 2 orang aparat dari TNI Angkatan Darat yang bertugas membantu menjaga keamanan dari keberlangsungan Bioskop Karia Kota Solok. Bagian kebersihan terdiri dari satu orang karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan baik di dalam bioskop maupun di luar bioskop, serta kebersihan gedung Bioskop Karia Solok secara keseluruhan. Dan bagian operator yang terdiri dari satu orang karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memutar film yang telah disediakan melalui satu ruangan khusus dengan memakai alat pemutar film. Struktur organisasi ini berlaku sejak sekitar tahun 1980-an dan masih berlangsung hingga tahun 2012 (Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021).

## **5. Berhenti Beroperasi**

Mulai pada tahun 2000-an, operasional Bioskop Karia Solok sangat kewalahan dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga bioskop mulai ditinggalkan oleh peminatnya yang disebabkan beberapa faktor yaitu:

### 1) Faktor Internal

- a. Lambatnya pembaruan kecanggihan teknologi seperti efek visual dan *soundsystem* terhadap bioskop, sehingga Bioskop Karia Solok tertinggal dari bioskop-bioskop yang teknologinya sudah modern mulai bermunculan di wilayah Sumatera Barat.
- b. Adanya Nepotisme yang dilakukan karyawan terhadap bioskop seperti contoh kasus dilapangannya yaitu menggratiskan keluarga para karyawan untuk menonton bioskop sehingga membuat pemasukan (profit) dari Bioskop Karia Solok menurun.
- c. Gedung bioskop sudah tidak digunakan untuk menikmati tayangan film, akan tetapi bioskop sudah berorientasi sebagai tempat asusila yang sebagian besar pelakunya yaitu kaum remaja, sehingga bioskop terkesan negatif bagi pandangan sebagian besar masyarakat.
- d. Pengeluaran operasional Bioskop Karia Solok ini melebihi dari pemasukannya, sehingga mengalami kebangkrutan (Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021).

### 2) Faktor Eksternal

- a. Mulai bermunculannya media DVD/VCD yang lebih menarik dan bisa dinikmati di rumah saja sehingga membuat menonton bioskop mulai ditinggalkan.
- b. Televisi sudah mulai merata dimiliki oleh masyarakat yang menayangkan beberapa stasiun TV, yang berisikan berita dan hiburan lainnya.
- c. Sudah adanya TV prabayar seperti Netflix dan lain-lainnya
- d. Kondisi ekonomi masyarakat yang menurun pada tahun 1998, hanya masyarakat ekonominya keatas yang mampu menikmati tayangan bioskop.

- e. Kapitalisasi modern membuat bioskop-bioskop berada di dalam pusat perbelanjaan sehingga pengusaha-pengusaha bioskop yang pernah berjaya menjadi gulung tikar.
- f. Adanya pembajakan film yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat tidak tertarik lagi menonton langsung ke bioskop, karena sudah bisa diakses dari sumber-sumber bajakan (Wawancara dengan Wirako Angriawan, 20 September 2021).

## **KESIMPULAN**

Dilihat dari Perkembangan bioskop di Indonesia telah ada sejak zaman Kolonial Belanda tepatnya di daerah Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Desember 1900. Pertunjukan gambar hidup pertama ini yang kelak bernama “The Roijal Bioscope” memberikan suasana baru dalam kehidupan masyarakat di bidang hiburan. Pada awal pertunjukannya hanya menyajikan film documenter yang berisikan potongan-potongan gambar peristiwa yang terjadi di Eropa dan Afrika Selatan yang tidak mengandung cerita. Gambar yang disajikan sering bergetar sehingga membuat mata cepat lelah dan membuat para penonton merasa bosan. Akibatnya, masyarakat yang mendatangi bioskop ini yang pada awalnya antusias menjadi berkurang. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Bioskop Karia Solok merupakan salah satu bioskop yang populer pada zamannya di wilayah Sumatera Barat. Didirikan pada tahun 1970 yang dikelola oleh PT. MHI yang dipimpin oleh We Shu Kiat. Sebelum bergerak di bidang perbioskopian, PT. MHI bergerak di bidang kilang minyak manis dan ekspor impor hasil-hasil perkebunan seperti kopi, kulit manis, getah dan lain-lain. Atas prakarsa menantunya yang bernama Ang Eng Kwan membuka usaha baru dalam bidang hiburan melalui pemutaran film di bioskop. Usaha bioskop dan distributor film berhenti sejak tahun 2019, sedangkan usaha kilang minyak manis dan ekspor impor hasil perkebunan sudah lama ditinggalkan karena sudah tidak menguntungkan lagi. Kehadiran Bioskop Karia di Kota Solok menarik minat masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan bioskop, dimana sejak awal beroperasi tahun 1970 sampai 1979 Bioskop Karia diminati masyarakat, bioskop yang semula menampung jumlah penonton 150 meningkat di tahun 1980-an menjadi 300 kapasitas, penambahan kapasitas ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Kota Solok untuk menonton bioskop dan juga meningkatkan dari waktu sebelumnya, kondisi ini bertahan meskipun pada tahun 1990 bangunan bioskop direlokasi sebagai akibat dari perluasan jalan. Memasuki tahun 2000-an Bioskop mulai mengalami kemunduran yang disebabkan faktor intern dan ekstern, sampai akhirnya berhenti beroperasi dan bangunan dijual pada tahun 2012.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bento, Matt. (1992). Masa-Masa Sulit Tahun 1965-1970. Jakarta: Gramedia. hal. 88
- Danujaya, Budiarto. (1992). Hari-Hari Yang Paling Riuhs 1962-1965. Jakarta: Gramedia. hal. 68-84

- Dewan Film Nasional, (1980). Pedoman Pembinaan Sektoral Bidang Produksi, Peredaran/Pemasaran Dan Dana Pembinaan Perfilman Nasional. Jakarta: PFSI, hal, 52
- Dewan Film Nasional. (1971). Peraturan Menteri Penerangan, hal. 53
- Eliyati, Vivi. Skripsi. Sejarah Bioskop di Kota Padang: Studi Kasus Bioskop Karia Padang tahun 1921-1995. (Padang: Universitas Andalas, 1999)
- Erwantoro, Heru. (1995). Sejarah Perfilman Indonesia Babak Hindia Belanda-Jepang 1900-1945, Bandung: Depdikbud, hal. 29-30
- Gottschalk, Louis. (1985). Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 43
- Lizuardi, Martina. Skripsi. Analisa Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Studi Kasus PT MHI Karia Theater Padang. (Padang: Fekon Bung Hatta, 1995), hal. 63
- Mansoer, MD. (1970). Sejarah Minangkabau. Djakarta: Bhratara, hal. 209-210
- Naim, Mochtar. (1995). Merantau: Pola Migrasi Masyarakat Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 262-266
- Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1977). Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat. Jakarta: Depdikbud, hal. 178
- Said, Salim. (1982). Profil Dunia Film Indonesia, Jakarta: Grafik Pers, hal, 39
- Setia, Putu. (1995). Pulih Kembali Tahun 1950-1962. Bandung: Depdikbud. hal. 52-53
- Sri Hastuti, Rita. (1989). Monopoli , Ada, Tidak Ada...” Editor No. 49 Tahun II pada tanggal 12 Agustus, hal. 21
- Yusa Biran, Miscbach. (2009). Sejarah Film 1900-1950 : Bikin Film di Jawa. Jawa Barat: Komunitas Bambu
- Tim Media, (1991). Dominasi Film Impor Dan Dilema Film Nasional. Media Indonesia
- Wawancara dengan Wirako Angriawan (Pemilik Bioskop Karia), pada tanggal 20 September 2021 di Jalan Ratulangi No. 15, Kota Padang
- Wawancara dengan Feri (Karyawan Bioskop Karia Kota Solok), pada tanggal 28 September 2021 di Kota Solok.